

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Grand theory dalam penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory*. Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini berasumsi bahwa manajemen sebagai pihak yang berintegritas tinggi, memiliki kejujuran dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tindakan sebaik-baiknya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Dalam teori ini manajer akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Berdasarkan asumsi teori *stewardship* yang menyatakan bahwa manajer akan berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan organisasi dan bekerja berdasarkan pemikiran bahwa keuntungan (pemuahan kebutuhan) manajer atau *steward* dan pemilik atau prinsipal berasal dari organisasi yang kuat dan juga secara ekonomi. Dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah manfaatnya ke teori *stewardship* yaitu informasi lebih berkualitas, berdasarkan teori ada hubungan positif antara kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan teori *stewardship*. Pemerintah yang bertindak sebagai manajer mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Pemerintah daerah selaku manajer wajib memberikan laporan pertanggungjawaban yang tertuang dalam APBD kepada rakyat dalam bentuk LKPD yang telah diaudit oleh BPK. Berdasarkan teori *stewardship* ini, kinerja kepala daerah akan dinilai dalam laporan

pertanggungjawabannya kepada DPRD tentang keberhasilan program dan kebijakannya yang tercermin pada realisasi APBD serta opini LKPD yang diperoleh pemerintah daerah (Donaldson dan Davis, 1991) dalam (Puspitawati, 2016).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal (Wahida, 2015).

Objek penelitian ini adalah bagian dari organisasi sektor publik yaitu pemerintah daerah. Penelitian ini akan menguji efek pembelajaran teori *stewardship* terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance* dan Inventarisasi Aset Tetap serta dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

2.1.2.1 Definisi Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Iman Mulyana (2010:96), “Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.”

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.1, definisi laporan keuangan adalah, sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas.”

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Lampiran II.02, Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,

realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pemberian informasi keuangan yang tidak dapat diandalkan akan mempengaruhi kualitas keputusan baik bagi pemakai internal maupun pemakai eksternal.

Secara spesifik, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Lampiran I.02, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan, dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan, dengan cara:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.2.3 Peranan Pelaporan Keuangan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk

mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (PP No. 71 Tahun 2010 Lampiran II.01):

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.1.2.4 Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Laporan keuangan pemerintah provinsi/kota/kabupaten terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur yaitu pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4) Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau terinci dari angka tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.2.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Kualitas laporan keuangan tercermin dari karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan

memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan teori variabel Kualitas Laporan Keuangan yang telah diuraikan, maka dapat disintesakan sebagai berikut

Tabel 2.1
Sintesis Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Variabel	Definisi	Dimensi	Indikator
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat berdasarkan karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.	Relevan	1. Kelengkapan informasi yang disajikan 2. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan
		Andal	1. Keakuratan informasi yang disajikan 2. Penyajian secara jujur

	(Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010)	Dapat dibandingkan	1. Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya 2. Berpedoman pada SAP
		Dapat dipahami	1. Sistematis 2. Jelas

Sumber: *Diolah dari teori, 2020*

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Standar sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan laporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inskonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan (Mardiasmo, 2018).

Sampai dengan tahun 2003 standar akuntansi pemerintahan yang berlaku adalah SAP Berbasis Kas (*cash basis*), sedangkan pada periode tahun 2004 sampai dengan 2014 standar akuntansi pemerintahan yang berlaku adalah SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (*cash towards accrual basis*). Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah SAP Berbasis Akrual (*accrual basis*). SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Akuntansi akrual dianggap lebih baik dibandingkan dengan akuntansi kas. Akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Mardiasmo, 2018).

2.1.3.1 Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, standar akuntansi pemerintahan adalah “prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah.” Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013, SAP berbasis akrual adalah “SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran.”

Bastian (2010) mengemukakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut:

Persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan yaitu prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.1.3.2 Struktur SAP berbasis akrual

SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Struktur SAP berbasis akrual (Lampiran I Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010):

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan

5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pekerjaan
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional

2.1.3.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu :

1) Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas. Berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat

kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah.

2) Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban pada masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal yang tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3) Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

4) Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas catatan atas laporan keuangan.

5) Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas laporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumberdaya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode

utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan dan semesteran juga dianjurkan.

6) Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7) Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8) Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Jika dalam melakukan kegiatan akuntansi serta dalam menyusun laporan keuangan menerapkan prinsip-prinsip tersebut yang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, maka laporan keuangan tersebut bisa dimengerti dan dipahami oleh berbagai pihak. Dengan demikian, untuk menunjang laporan keuangan yang baik maka prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami dan diterapkan.

Berdasarkan teori variabel Kualitas Laporan Keuangan yang telah diuraikan, maka dapat disintesakan sebagai berikut

Tabel 2.2
Sintesis Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁)

Variabel	Definisi	Dimensi	Indikator
Standar Akuntansi Pemerintahan (X ₁)	Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010)	PSAP No.1 Penyajian Laporan Keuangan	1. Penyajian laporan keuangan sesuai SAP 2. Basis akrual pengakuan aset
		PSAP No.2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	1. Basis kas pengakuan belanja 2. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran lengkap
		PSAP No.3 Laporan Arus Kas (LAK)	1. Penyusunan LAK sesuai SAP 2. Penyajian arus kas masuk dan keluar
		PSAP No.4 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	1. Penyusunan CaLK secara lengkap 2. Penyajian CaLK setiap periode pelaporan
		PSAP No.5 Akuntansi Persediaan	1. Pencatatan Persediaan 2. Pengakuan Persediaan
		PSAP No.6 Akuntansi Investasi	1. Penilaian investasi atas kepemilikan non-permanen. 2. Pencatatan investasi untuk kepemilikan permanen
		PSAP No.7 Aset Tetap	1. Pengklasifikasian Aset Tetap 2. Pencatatan Aset Tetap

		PSAP No.8 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	1. Pengungkapan informasi KDP 2. Pemindahan KDP
		PSAP No.9 Akuntansi Kewajiban	1. Pencatatan kewajiban 2. Pengakuan kewajiban
		PSAP No.10 Koreksi Kesalahan	1. Koreksi kesalahan berkala 2. Koreksi kesalahan sesuai pedoman SAP
		PSAP No.11 Laporan Keuangan Konsolidasi	1. Penyajian laporan keuangan konsolidasi semua entitas akuntansi 2. Penyajian laporan keuangan konsolidasi setiap periode pelaporan
		PSAP No.12 Laporan Operasional (LO)	1. Penyajian LO yang lengkap 2. Penyusunan LO setiap periode akuntansi

Sumber: *Diolah dari teori, 2020*

2.1.4 Good Governance

Good governance diterapkan pemerintah agar dapat menciptakan birokrasi yang ideal dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu, dengan adanya *good governance* diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik berkaitan dengan pendanaan untuk masyarakat, kemudian pendanaan tersebut dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan pemerintah ke dalam laporan keuangan yang dapat memberikan informasi berkualitas kepada publik.

Penerapan *good governance* bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan keuangan daerah secara terbuka dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip dari *good governance* dapat meningkatkan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang taat dengan aturan, memiliki prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2.1.4.1 Definisi *Good Governance*

Menurut Mardiasmo (2018), pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* (dalam Nofianti, 2015:50), mendefinisikan *good governance* sebagai berikut:

Good Governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Bila dilihat dari beberapa pengertian *Good Governance* menurut para ahli, maka dapat disimpulkan mengenai *Good Governance* lebih berfokus pada pengelolaan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat secara bertanggungjawab sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

2.1.4.2 Karakteristik *Good Governance*

United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi (dalam Mardiasmo, 2018):

1) *Participation*

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2) *Rule of law*

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa memandang status.

3) *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4) *Responsiveness*

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

5) *Consesensus orientation*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6) *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7) *Efficiency and Effectiviness*

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdayaguna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8) *Accountability*

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9) *Strategic vision*

Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Berdasarkan teori variabel Kualitas Laporan Keuangan yang telah diuraikan, maka dapat disintesakan sebagai berikut

Tabel 2.3
Sintesis *Good Governance* (X₂)

Variabel	Definisi	Dimensi	Indikator
<i>Good Governance</i> (X ₂)	<i>Good Governance</i> sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi	<i>Participation</i> (Partisipasi)	1. Partisipasi dalam membuat kebijakan 2. Partisipasi dalam pemerintahan
		<i>Rule of law</i> (Kerangka Hukum yang Adil)	1. Menyusun kerangka hukum yang adil 2. Menegakkan hukum yang adil
		<i>Transparency</i> (Transparansi)	1. Pengembangan sistem akuntansi untuk publikasi berdasarkan SAP 2. Publikasi informasi untuk pihak yang berkepentingan

<p>dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan <i>legal and political framework</i> bagi tumbuhnya aktivitas usaha. (World Bank dalam Mardiasmo, 2018)</p>	<p><i>Responsiveness</i> (Cepat dan Tanggap)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan 2. Penyampaian informasi dengan cepat, utuh, dan tepat waktu
	<p><i>Consensus Orientation</i> (Kepentingan Semua Pihak)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan dengan orientasi kepentingan semua pihak. 2. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan semua pihak
	<p><i>Equity</i> (Kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan 2. Perlakuan secara adil atas <i>reward</i> dan <i>punishment</i>
	<p><i>Efficiency and Effectiveness</i> (Efisien dan Efektif)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan sumberdaya yang dimiliki secara efisien dan efektif 2. Pengelolaan dan pelaksanaan program kerja secara efektif dan efisien
	<p><i>Accountability</i> (Pertanggungjawaban)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban secara rutin dan tertulis 2. Penyajian laporan keuangan setiap periode pelaporan bentuk pertanggungjawaban
	<p><i>Strategic vision</i> (Visi, misi, dan strategi secara jelas)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki visi, misi, dan strategi secara jelas 2. Rincian tugas secara jelas selaras dengan visi, misi, dan strategi organisasi

Sumber: Diolah dari teori, 2020

2.1.5 Inventarisasi Aset Tetap

2.1.5.1 Aset Tetap

2.1.5.1.1 Definisi Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07, Aset tetap adalah “aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.”

2.1.5.1.2 Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor.
2. Hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah. Seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Dalam rangka pertanggungjawaban hasil Inventarisasi aset tetap/barang milik daerah untuk tujuan pelaporan keuangan pada Neraca, pengelompokan BMD didasarkan pada kelompok aset tetap sebagaimana diatur di dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas terdiri dari:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

3. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

4. Jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Golongan aset ini disebutkan dalam dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang terdiri atas buku perpustakaan, buku terbitan berkala, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kesenian atau kebudayaan, serta hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan.

6. Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.5.2 Inventarisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 1 angka (49) menyebutkan bahwa, Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

2.1.5.2.1 Tujuan Inventarisasi Aset Tetap

Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Inventarisasi Aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi aspek fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat, dan sebagainya. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/*labelling*, dan pengelompokkan.

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, tujuan inventarisasi aset tetap, meliputi:

1. Menginventarisasi dan mengamankan seluruh Barang Milik Daerah pada organisasi perangkat daerah yang hingga saat ini belum terinventarisasi dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Menyajikan nilai koreksi BMD pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Melakukan sertifikasi BMD atas nama Pemerintah Daerah.

2.1.5.2.2 Obyek Inventarisasi Aset Tetap

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, adapun yang termasuk dalam obyek Inventarisasi Aset Tetap/Barang Milik Daerah, meliputi:

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan undang-undang

- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Berikut beberapa hal terkait inventarisasi dalam siklus pengelolaan aset daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 476 dan 477 :

- 1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- 2) Kegiatan Inventarisasi disusun dalam Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Buku Inventaris memuat data meliputi lokasi, jenis/*merk*, tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.
- 3) Dalam hal BMD berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.
- 4) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.
- 5) Pengelola Barang melakukan inventarisasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

2.1.5.2.3 Pelaksanaan Inventarisasi

Pelaksanaan inventarisasi dibagi dalam dua kegiatan yakni pelaksanaan pencatatan dan pelaksanaan pelaporan. Adapun data-data pencatatan dan pelaporan dimaksud adalah sebagai berikut (dalam Tulisan Hukum Sondang Malia, 2016: 8-10):

a) Administrasi Pencatatan

1. Kartu Inventaris Barang (KIB)

Kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, *merk*, tipe,

nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan. Adapun KIB terdiri dari 6 (enam) macam, yaitu :

- a) KIB A : Tanah
- b) KIB B : Peralatan dan Mesin
- c) KIB C : Gedung dan Bangunan
- d) KIB D : Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e) KIB E : Aset Tetap Lainnya
- f) KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan

2. **Kartu Inventaris Ruangan (KIR)**

KIR adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. KIR ini harus dipasang di setiap ruangan kerja, pemasangan maupun pencatatan inventaris ruangan menjadi tanggung jawab Pengurus Barang dan Kepala Ruangan disetiap SKPD.

3. **Buku Inventaris (BI)**

Buku ini merupakan buku yang berisi himpunan catatan data teknis dan administrasi yang diperoleh dari KIB hasil inventarisasi. Penulis mengamati bahwa pencatatan pada BI ini sangat tergantung pada validitas data yang ada pada KIB, sehingga ketersediaan data KIB secara langsung akan mempengaruhi isi dari BI tersebut.

4. **Buku Induk Inventaris (BII)**

Buku Induk Inventaris (BII) merupakan gabungan/kompilasi buku inventaris sedangkan buku inventaris adalah himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperoleh dari catatan kartu barang inventaris. Pembantu Pengelola mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah. Prosedur pengisian BII, adalah sebagai berikut:

- a) Pengguna melaksanakan inventarisasi barang yang dicatat di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E, dan F) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) secara kolektif atau secara tersendiri per jenis barang rangkap 2 (dua).

- b) Pengguna barang bertanggungjawab dan menghimpun KIB dan KIR dan mencatatnya dalam Buku Inventaris yang datanya dari KIB A, B, C, D, E, dan F serta membuat KIR dimasing-masing ruangan.
 - c) Pembantu pengelola barang mengkompilasi Buku Inventaris menjadi Buku Induk Inventarisasi (BII).
 - d) Rekapitulasi BII ditandatangani oleh pengelola atau pembantu pengelola.
 - e) BII berlaku untuk 5 (lima) tahun.
- b) Administrasi Pelaporan
1. **Daftar Rekapitulasi Inventaris**
Daftar Rekapitulasi Inventaris disusun oleh pengelola/pembantu pengelola dengan mempergunakan bahan dari Rekapitulasi Inventaris Barang yang disampaikan oleh Pengguna.
 2. **Daftar Mutasi Barang**
Daftar Mutasi Barang memuat data barang yang berkurang dan/atau yang bertambah dalam suatu jangka waktu tertentu (1 semester dan 1 tahun).
Mutasi barang terjadi karena:
 - a) Bertambah pengadaan baru karena pembelian, sumbangan atau hibah, tukar-menukar, perubahan peningkatan kualitas (guna susun).
 - b) Berkurang karena dijual/dihapuskan, musnah/hilang, dihibahkan/disumbangkan, tukar menukar/dilepaskan dengan ganti rugi.

Tabel 2.4
Sintesis Inventarisasi Aset Tetap (X₃)

Variabel	Definisi	Dimensi	Indikator
Inventarisasi Aset Tetap (X ₃)	Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset tetap/barang milik daerah. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016)	Pendataan	1. Pendataan dilakukan secara berkala 2. Pendataan dalam Daftar Barang Pengguna
		Pencatatan	1. Pencatatan Kartu Inventaris Barang (KIB) 2. Pencatatan Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

		Pelaporan hasil pendataan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaporan hasil pendataan Aset Tetap sesuai SAP2. Pelaporan hasil pendataan atas jumlah dan nilai Aset Tetap
--	--	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: *Diolah dari teori, 2020*

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance* dan Inventarisasi Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang diuraikan dalam tabel 2.5 tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.5
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ni Made Mei Anggreni, A. A. G. P. Widana putra, dan I G. A. M. Asri Dwija Putri (<i>E-Journal Akuntansi Universitas Udayana</i> , Vol. 22, No. 1. ISSN: 2302-8556. Januari, 2018)	Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan di Kota Denpasar	Independen : $X_1 = \text{Good Governance}$ $X_2 = \text{Kompetensi Sumber Daya Manusia}$ Dependen : $Y = \text{Kualitas Laporan Keuangan di Kota Denpasar}$	1. <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan pada Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini memberi gambaran bahwa semakin baik penerapan <i>Good Governance</i> semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan di pemerintah Kota Denpasar. 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan pada Kualitas Laporan Keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Manusia semakin meningkat pula Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Denpasar.
2.	Novira Juwita Andiani, Dini Wahyu Hapsari, dan Muhamad Muslih (<i>Jurnal e-Proceeding of Management</i> , Vol. 4, No. 3. ISSN: 2355-9357. Desember, 2017)	Pengaruh Penatausahaan Dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat	Independen : $X_1 = \text{Pembukuan}$ $X_2 = \text{Inventarisasi}$ $X_3 = \text{Pelaporan}$ $X_4 = \text{Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara}$	1. Secara deskriptif diperoleh bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penerapan SIMAK BMN pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta berada pada kategori baik. 2. Berdasarkan pengujian hipotesis simultan, diperoleh bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penerapan

		Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)	Dependen : Y = Kualitas Laporan Keuangan	SIMAK BMN berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 3. Berdasarkan pengujian hipotesis parsial, diperoleh bahwa : a. Pembukuan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. b. Inventarisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. c. Pelaporan tidak memiliki pengaruh signifikan, tetapi berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. d. Penerapan SIMAK BMN tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
3.	Desmaria Puji Kesuma, Choirul Anwar, dan Darmansyah (Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika. Vol. 1 No, 2. ISSN: 2337-6686. Desember, 2017)	Pengaruh <i>Good Governance</i> , Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Kementerian	Independen : X ₁ = <i>Good Governance</i> X ₂ = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dependen : Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah	1. Secara parsial, <i>good governance</i> dan Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 2. Secara Simultan, <i>Good Governance</i> , Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi

		Pariwisata		Aparatur Pemerintah memiliki pengaruh signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
4.	Hilaria Prima Andika Putri, Sopiyan dan Periansya (Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol. 3 No. 2. Juli, 2019)	Pengaruh Kompetensi, SPI, dan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali	<p>Independen :</p> <p>X_1 = Kompetensi</p> <p>X_2 = Sisitem Pengendalian Internal</p> <p>X_3 = Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual</p> <p>Dependen :</p> <p>Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Pali. 2. SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kabupaten Pali. 3. SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kabupaten Pali. 4. Kompetensi SDM, SPI, dan SAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kabupaten Pali.
5.	Eka Puteri Ardianti (Jurnal Ekobis Dewantara, Vol. 1 No. 2. Februari, 2018)	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> , Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada	<p>Independen :</p> <p>X_1 = Penerapan <i>Good Governance</i></p> <p>X_2 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p> <p>X_3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>Good Governance</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Gunung Kidul. 2. Sistem Akuntansi Keuangan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Gunung

		SKPD Kabupaten Gunung Kidul)	Dependen : Y = Kualitas Laporan Keuangan	Kidul. 3. Pemanfaatan teknologi Informasi memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Gunung Kidul. 4. Secara simultan, Penerapan <i>Good Governance</i> , Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Gunung Kidul.
6.	Gusrya Indria Sari dan Fadli (Jurnal Akuntansi, Vol. 7, No. 3. ISSN: 2303-0356. Oktober, 2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Independen : X ₁ = Penerapan <i>Good Governance</i> X ₂ = Penerapan SAP X ₂ = Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dependen : Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah	1. Penerapan <i>good governance</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah 2. Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 3. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah

7.	Defi Nopianti dan Tuti Herawati (Jurnal <i>STAR-Study and Accounting Research</i> . Vol. 14 No. 2, 2017)	Pengaruh Penerapan SAP dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Independen : X_1 = Penerapan SAP Pemerintahan X_2 = Penerapan <i>Good Governance</i> Dependen : Y = Kualitas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan SAP dan <i>Good Governance</i> secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan <i>Good Governance</i> memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
8.	Anshari dan Efrizal Syofyan (Jurnal <i>Ekobis Dewantara</i> , Vol. 4 No. 1, 2016)	Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang	Independen : X_1 = Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) X_2 = Legal audit X_3 = Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) X_4 = Pengendalian dan pengawasan Barang Dependen : Y = Kualitas Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang. 2. Legal audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang. 3. Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang. 4. Pengendalian dan pengawasan Barang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan

				keuangan pada Pemerintah Kota Padang.
9.	Irwan Mansur (Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol. 10, Edisi 2. Desember, 2018)	Pengaruh Inventarisasi Aset, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan terhadap Optimalisasi Aset dan Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Taliabu Pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah.	Independen : $X_1 =$ Inventarisasi Aset $X_2 =$ Kualitas Sumber Daya Manusia $X_3 =$ Komitmen Pimpinan Dependen : $Y =$ Optimalisasi Aset dan Kualitas Laporan Keuangan	1. Inventarisasi aset, Komitmen Pimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset. Tetapi, Kualitas Sumber Daya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Optimalisasi Aset. 2. Inventarisasi Aset, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
10.	Mia Oktarina, Kharis Raharjo, dan Rita Andini (<i>Journal of Accounting</i> , Vol. 2 No. 2. Maret, 2016)	Pengaruh Penerapan SAP, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014)	Independen : $X_1 =$ Penerapan SAP $X_2 =$ Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah $X_3 =$ <i>Good Governance</i> Dependen : $Y =$ Kualitas Laporan Keuangan	1. SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 2. Kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 3. <i>Good Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3 Kerangka Pemikiran

Peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance*, dan Inventarisasi Aset Tetap mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel terikat Pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

2.3.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah atas pelaksanaan APBD, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas, yang mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang mencakup tertib administrasi dan taat asas, sehingga dapat bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP memberikan rambu-rambu bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Dengan mengacu pada SAP maka diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan akan dapat dibandingkan dan berguna untuk penilaian kinerja pemerintah. Jadi, semakin baik Penerapan SAP maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah. Maka dapat dinyatakan bahwa dengan adanya Penerapan SAP akan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hal ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mia Oktarina, dkk (2016) tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang, yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kota Semarang. Artinya, semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka semakin baik kualitas laporan keuangan.

2.3.2 Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengelolaan keuangan organisasi perangkat daerah yang menerapkan *good governance* secara efektif sangat potensial dalam menentukan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri dan kemudian akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara.

Dalam rangka untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban, selain mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku, suatu pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya juga harus menerapkan 9 karakteristik pelaksanaan *good governance* yang ditetapkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* atau Badan Program Pembangunan PBB, sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Karakteristik tersebut terdiri dari: *Participation, Rule of law, Transparency, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Efficiency and Effectiveness, Accountability*, dan *Strategic vision*. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.

Hal ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Made Mei Anggreni, dkk (2018) tentang Pengaruh *Good Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Kualitas Laporan Keuangan di Kota Denpasar, yang menyatakan bahwa *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas

Laporan Keuangan di Kota Denpasar. Artinya, semakin baik penerapan *good governance* maka semakin baik kualitas laporan keuangan.

2.3.3 Pengaruh Inventarisasi Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kegiatan inventarisasi aset tetap dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah termasuk aset tetap berupa Barang Milik Daerah (BMD) yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Hal ini penting untuk pembuatan neraca kekayaan daerah yang akan dilaporkan. Pemerintah pusat maupun daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan inventarisasi yang baik dan terintegrasi maka akan mencegah terjadinya sengketa ataupun perpindahan hak milik.

Pengelolaan aset daerah yang baik dapat memaksimalkan fungsi aset daerah atau dengan kata lain efektifitas manajemen aset terpenuhi. Dengan adanya inventarisasi aset yang baik maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Irwan Mansur, 2018).

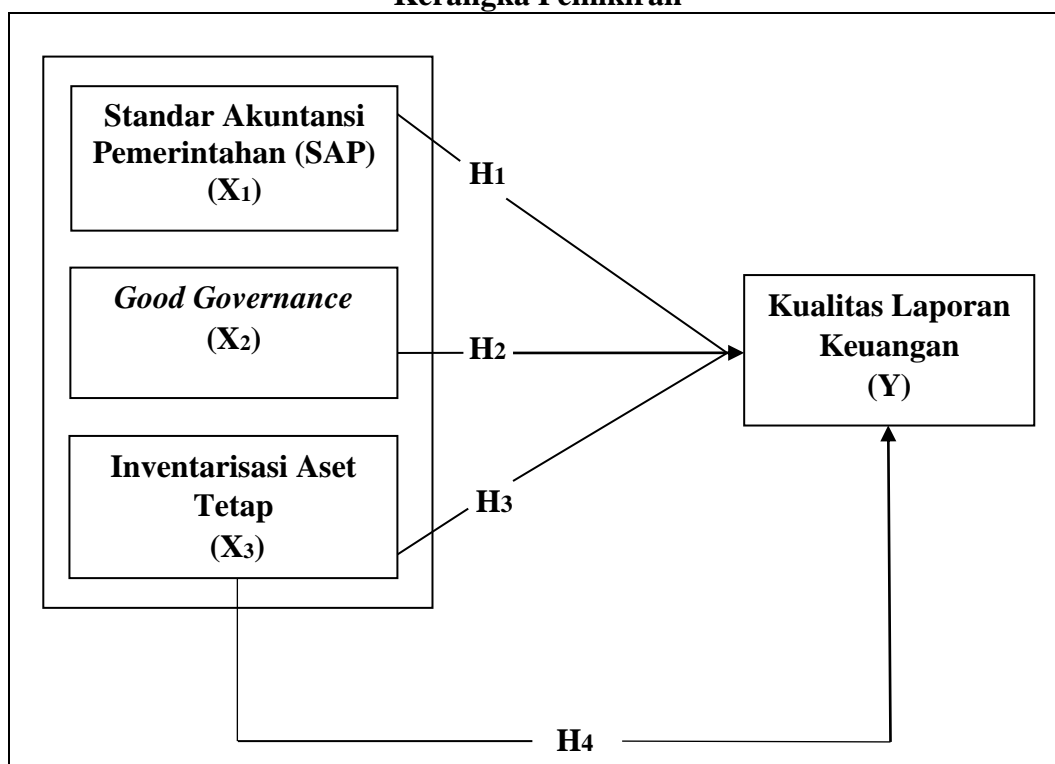
Penelitian ini didukung oleh *teori stewardship* yang menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Apabila Aset Tetap dikelola dengan baik, dan memberikan kepuasan bagi masyarakat khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya, maka akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Hal ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Anshari dan Efrizal Syofyan (2016) tentang Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang, yang menyatakan bahwa Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang. Dan juga penelitian yang telah dilakukan oleh Irwan Mansur (2018) tentang Pengaruh Inventarisasi Aset, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan

terhadap Optimalisasi Aset dan Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Taliabu Pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah, yang menyatakan bahwa Inventarisasi Aset memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Artinya, semakin baik penerapan inventarisasi aset maka semakin baik kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: *Data yang diolah, 2020*

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini memiliki peranan sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance*, dan Inventarisasi Aset Tetap secara parsial maupun simultan mempengaruhi variabel terikat yaitu Kualitas Laporan Keuangan.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2016).

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Diduga Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.
- H₂ : Diduga *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.
- H₃ : Diduga Inventarisasi Aset Tetap berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.
- H₄ : Diduga Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance*, dan Inventarisasi Aset Tetap secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.